

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian yang membahas mengenai standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan.

2.1.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

2.1.1.1 Pengertian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Yoyo Sudiaryo, dkk (2017:33) Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik pusat maupun daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Mahmudi (2013:271) definisi standar akuntansi pemerintah adalah salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa standar akuntansi pemerintah merupakan pedoman yang mengatur sistem pelaporan keuangan dan akuntansi

pemerintah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintahan

2.1.1.2 Indikator Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Mursyidi (2013:48) indikator standar akuntansi pemerintahan sebagai berikut:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

2. Prinsip nilai historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Prinsip realisasi

Bagi pemerintah, Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak

temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*)
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Prinsip Perioditas
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulan dan semesteran juga dianjurkan.
6. Prinsip konsistensi
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang seupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Prinsip pengungkapan lengkap
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.
8. Prinsip penyajian wajar
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja

mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

Sedangkan menurut Abdul Hafiz Tanjung (2015:82) indikator standar akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) PSAP 1 Penyajian Laporan Keuangan
 Pada PSAP 1 diuraikan tujuan laporan keuangan, tanggung jawab pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta struktur dan isi laporan keuangan. Komponen Laporan Keuangan ada 7 yaitu Laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.
- 2) PSAP 2 Laporan Realisasi Anggaran
 PSAP 2 mengatur tentang penyajian laporan realisasi anggaran. Isi PSAP 2 ini meliputi struktur dan isi laporan realisasi anggaran serta akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus/defisit LRA, akuntansi pembiayaan, akuntansi penerimaan pembiayaan, akuntansi pengeluaran pembiayaan, akuntansi pembiayaan netto dan akuntansi sisa lebih kurang pembiayaan anggaran.
- 3) PSAP 3 Laporan Arus Kas
 PSAP 3 ini mengatur tentang penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan kas awal periode, sumber dan penggunaan kas, serta saldo kas akhir periode. Arus kas terbagi menjadi 4 yaitu:
 - a) Arus Kas Aktivitas Operasi
 - b) Arus Kas Aktivitas Investasi
 - c) Arus Kas Aktivasi Pendanaan
 - d) Arus Kas Aktivasi Transitoris
- 4) PSAP 4 Catatan Atas Laporan Keuangan
 PSAP ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Isi PSAP ini meliputi ketentuan umum serta struktur dan isi informasi dalam catatan atas laporan keuangan.
- 5) PSAP 5 Akuntansi Persediaan
 PSAP 5 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi terhadap persediaan. Perlakuan akuntansi yang dimaksud meliputi pengakuan, pengukutan, penilaian dan pengungkapan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang untuk dijual diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- 6) PSAP 6 Akuntansi Investasi
PSAP 6 mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi. Isi PSAP 6 meliputi klasifikasi investasi dan pengakuan investasi. Pengertian investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi dibagi menjadi 2 yaitu ada investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Pengakuan investasi diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang.
- 7) PSAP 7 Akuntansi Aset Tetap
PSAP 7 mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap seperti klasifikasi aset tetap yang mengklasifikasikan aset pemerintah yaitu tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan. Selanjutnya ada pengakuan aset tetap yang diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Kriterianya seperti berwujud memiliki masa manfaat lebih dari setahun, harga perolehan aset tetap dapat diukur secara andal dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
- 8) PSAP 8 Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan
Isi PSAP 8 adalah kontruksi dalam pengerjaan, pengakuan kontruksi dalam pengerjaan dan pengukuran kontruksi dalam pengerjaan. Kontruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Selanjutnya pengakuan kontruksi dalam pengerjaan yang diakui ada 3 yaitu:
1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
 2. Biaya perolehan tersebut dalam proses pengerjaan.
 3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan
- Lalu pengukuran kontruksi dalam pengerjaan akan dicatat sebesar biaya perolehan.
- 9) PSAP 9 Akuntansi Kewajiban
Isi PSAP 9 meliputi klasifikasi kewajiban, pengakuan kewajiban dan pengukuran kewajiban. Klasifikasi kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan. Selanjutnya pengakuan kewajiban yaitu kewajiban dapat diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Lalu pengukuran kewajiban adalah kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal kewajiban merupakan pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
- 10) PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak dilanjutkan.
Isi PSAP 10 meliputi tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan.

Koreksi kesalahan adalah penyajian akun yang secara signifikan tidak sesuai dengan seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Selanjutnya perubahan kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, perubahan bisa terjadi apabila ada perubahan dan perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Lalu ada perubahan estimasi akuntansi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi mendasari estimasi tersebut atau karena terdapat informasi baru atau perkembangan isinya. Dan yang terakhir ada operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program atau kegiatan isinya.

11) PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi

Isi dari PSAP 11 mengenai penyajian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan yang disusun entitas akuntansi meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada teori menurut Mursyidi (2013:48) yang mengatakan bahwa indikator standar akuntansi pemerintahan diantaranya adalah basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*), prinsip perioditas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap dan prinsip penyajian wajar. Namun, untuk kebutuhan penelitian ini penulis tidak memakai semua indikator tersebut. Indikator yang digunakan yaitu basis akuntansi, prinsip nilai historis, Prinsip Perioditas dan prinsip pengungkapan lengkap.

2.1.2 Peran Internal Audit

2.1.2.1 Pengertian Internal Audit

Menurut Faiz Zamzami, dkk (2017:2) definisi internal audit adalah sebagai berikut:

“Internal audit adalah Pegawai dari instansi atau organisasi yang tugas utamanya adalah melakukan penilaian secara independen dan memberikan jasa konsultasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional instansi/organisasi”.

Menurut Hiro Tugiman (2011:11) definisi internal audit adalah sebagai berikut:

“Internal audit atau Pemeriksaan Internal adalah suatu fungsi penilaian yang independensi dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan.”

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa internal audit merupakan suatu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan bagian internal audit dengan fungsi penilaian yang independensi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan organisasi.

2.1.2.3 Indikator Internal Audit

Menurut Faiz zamzami, dkk (2017:19) indikator internal audit adalah sebagai berikut:

1. Keahlian professional
Seorang auditor harus memiliki kecakapan professional yang memadai untuk melaksanakan audit. Organisasi auditor harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan dan evaluasi atas auditor untuk membantu organisasi auditor dalam mempertahankan auditor yang memiliki kompetensi yang memadai. Suatu organisasi auditor dapat menggunakan auditornya sendiri atau pihak luar yang memiliki pengetahuan, keahlian atau pengalaman di bidang tertentu, seperti akuntansi, statistik, hukum, teknik, desain, metodologi audit, teknologi

informasi, administrasi negara, ilmu ekonomi, ilmu social dan ilmu aktuaria. Auditor yang memiliki keahlian professional dapat diperoleh dari pendidikan yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan profesionalitas dan keahlian auditor.

2. Independen

Institusi dan auditor harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat memengaruhi independensi ketika melakukan audit. Auditor perlu mempertimbangkan tiga macam gangguan terhadap independensi, yaitu:

- 1) Gangguan pribadi
- 2) Gangguan ekstern
- 3) Gangguan organisasi

Apabila satu atau lebih dari gangguan independensi tersebut memengaruhi kemampuan auditor secara individu dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor tersebut harus menolak penugasan audit. Dalam keadaan auditor yang karena suatu hal tidak dapat menolak penugasan audit, gangguan yang dimaksud harus dimuat dalam bagian lingkup pada laporan hasil audit. Ketentuan independensi ini juga diberlakukan untuk tenaga ahli.

3. Kemahiran Profesional secara Cermat dan Seksama

Dalam pelaksanaan audit serta pelaporan hasil audit, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Kemahiran professional, menuntut auditor adalah untuk:

- 1) Melaksanakan skeptisme professional, yaitu sikap yang mencakup pikiran selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit.
- 2) Menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam pengumpulan bukti dan evaluasi objektif mengenai kecukupan, kompetensi dan relevansi bukti.

4. Sistem Pengendalian Mutu yang Memadai

Setiap institusi yang melaksanakan audit harus memiliki sistem pengendalian mutu yang memadai dan harus di-*review* oleh pihak lain yang kompeten. Sistem pengendalian mutu yang memadai bahwa organisasi auditor tersebut:

- 1) Telah menerapkan dan mematuhi Standar Audit yang berlaku.
- 2) Telah menetapkan dan mematuhi kebijakan dan prosedur audit yang memadai

Organisasi auditor yang melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit harus di-*Review* minimal 1 kali dalam 5 (lima) tahun oleh organisasi auditor ekstern yang kompeten dan independen.

Menurut Hiro Tugiman (2011:16) indikator Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Independensi
Auditor yang independen adalah auditor yang tidak terpengaruh oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam audit.
2. Kemampuan Profesional
Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas
Menurut Hiro Tugiman (2011:16) kemampuan profesional auditor internal meliputi :
 - 1) Unit Audit Internal
 - a) Personalia : harus memberikan jaminan keahlian teknis dan latar belakang pendidikan internal auditor yang akan ditugaskan.
 - b) Pengawasan : Unit audit internal harus memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal diawasi dengan baik.
 - 2) Audit Internal
 - a) Kesesuaian dengan standar profesi : pemeriksa internal harus mematuhi standar profesionalisme dalam melakukan pemeriksaan
 - b) Pengetahuan dan kecakapan : pemeriksa internal harus memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan.
 - c) Hubungan antar manusia berkelanjutan : pemeriksa internal harus memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif.
 - d) Pendidikan berkelanjutan : pemeriksa internal harus mengembangkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan
 - e) Ketelitian profesional : pemeriksa internal harus bertindak dengan ketelitian profesional yang seharusnya.
3. Lingkup Pekerjaan Audit Internal
Lingkup pekerjaan audit internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh perusahaan dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan (Hiro Tugiman, 2011: 41) yang mengandung arti bahwa :
 - a. Keandalan informasi : pemeriksa internal harus memeriksa keandalan informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dengan cara mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan informasi.
 - b. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana-rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk ditaati

- c. Perlindungan terhadap harta : Memeriksa sejauh mana kekayaan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan diamankan terhadap segala macam kerugian atau kehilangan.
 - d. Penggunaan sumber daya secara ekonomi dan efisien : pemeriksa internal harus menilai keekonomisan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada.
 - e. Pencapaian tujuan : pemeriksa internal menilai mutu hasil pekerjaan dalam melaksanakan tanggung jawab atau kewajiban yang diserahkan serta memberi rekomendasi atau saran untuk meningkatkan efisiensi operasi.
4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan
- Pelaksanaan pemeriksaan audit yang telah di dukung dan disetujui oleh manajemen merupakan ketentuan yang harus dilakukan dalam melaksanakan pemeriksaannya. Program pemeriksaan internal dapat dipakai sebagai tolak ukur bagi para pelaksana pemeriksa. Empat langkah kerja Pelaksanaan pemeriksaan menurut Hiro Tugiman (2011: 18) yaitu :
- a. Perencanaan pemeriksaan, pemeriksaan internal harus merencanakan setiap pelaksanaan audit.
 - b. Pengujian dan pengevaluasian informasi, auditor internal harus mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan dan mendokumentasikan informasi untuk mendukung hasil audit.
 - c. Penyampaian hasil pemeriksaan, auditor internal harus melaporkan hasil pekerjaan audit mereka.
 - d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan, auditor internal harus melakukan tindak lanjut untuk meyakinkan bahwa tindakan tepat telah diambil dalam melaporkan temuan audit.
5. Manajemen Bagian Audit Internal
- Dalam manajemen audit internal seorang pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat, menurut Hiro Tugiman (2011:19) meliputi :
- a. Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung jawab : pimpinan audit internal harus memiliki pernyataan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagi bagian audit internal dengan jelas.
 - b. Perencanaan : Pimpinan audit internal harus menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal.
 - c. Kebijakan dan prosedur : Pimpinan audit internal harus membuat berbagai kebijaksanaan dan prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan sebagai pedoman oleh staf pemeriksa.
 - d. Manajemen personel : Pimpinan audit internal harus menetapkan program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal.
 - e. Pengendalian mutu : Pimpinan audit internal harus menetapkan dan mengembangkan pengendalian mutu atau jaminan kualitas untuk mengevaluasi berbagai kegiatan bagian audit internal

Berdasarkan uraian diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada teori menurut Faiz Zamzami, dkk (2014:19) yang mengatakan bahwa indikator internal audit diantaranya adalah Keahlian Profesional, Independen, Kemahiran Profesional secara Cermat dan Seksama dan Sistem Pengendalian Mutu yang memadai.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Erlina (2015:25) definisi Kualitas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Kualitas Laporan Keuangan adalah ukuran orang yang menilai atau merinci dari suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan transaksi ekonomi yang menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan uang dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintahan daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.

Menurut Baldric (2015:12) definisi Kualitas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Kualitas Laporan keuangan adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut”.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa Kualitas laporan keuangan merupakan laporan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan

memiliki empat karakteristik diantaranya yaitu andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

2.1.3.2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Baldric Siregar (2015:77) indikator kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini dan memprediksi masa depan. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan :

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b) Tepat waktu.
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- c) Lengkap.
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikatnya penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

- a) Penyajian jujur.
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan dapat disajikan.
- b) Dapat Diverifikasi.
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c) Netralisasi

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan
Laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode dan antar unit pemerintahan.
4. Dapat dipahami
Informasi yang disajikan oleh laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Hal serupa juga menurut Indra Bastian (2010:48) indikator kualitas laporan

keuangan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Relevan
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
2. Andal
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi dan netralitas.
3. Dapat Dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4. Dapat Dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan

dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada teori menurut Baldric Siregar (2015:77) yang mengatakan bahwa indikator kualitas laporan keuangan diantaranya adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Adapun pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan menurut Yoyo Sudaryo, dkk (2017:35) mengatakan bahwa:

“Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah”.

Selanjutnya dikatakan pula oleh Deddi Noerdiawan (2008:123) mengatakan bahwa:

“Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah”

Berdasarkan pemaparan di atas tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan dapat dikatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam penelitian sebelumnya dikatakan Menurut Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal senada juga dikatakan dalam penelitian sebelumnya menurut Rukmi Juwita (2013) menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Dari beberapa pernyataan diatas bahwa kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintahan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pemerintah harus sepenuhnya menerapkan standar akuntansi pemerintahan. Semakin tinggi standar akuntansi pemerintahan diterapkan, maka kualitas laporan keuangan semakin baik karena pada dasarnya standar akuntansi pemerintahan ini dibuat sebagai pedoman untuk mengatur bagaimana seharusnya penyajian laporan keuangan pemerintah dibuat.

2.2.2 Pengaruh Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Menurut Winwin Yadiati dan Abdulloh Mubarok (2017:102) mengemukakan bahwa:

“Audit Internal sebagai suatu fungsi perusahaan memiliki peran strategis dalam membantu perusahaan mencapai tujuannya. Terkait informasi keuangan, audit internal dapat membantu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.”

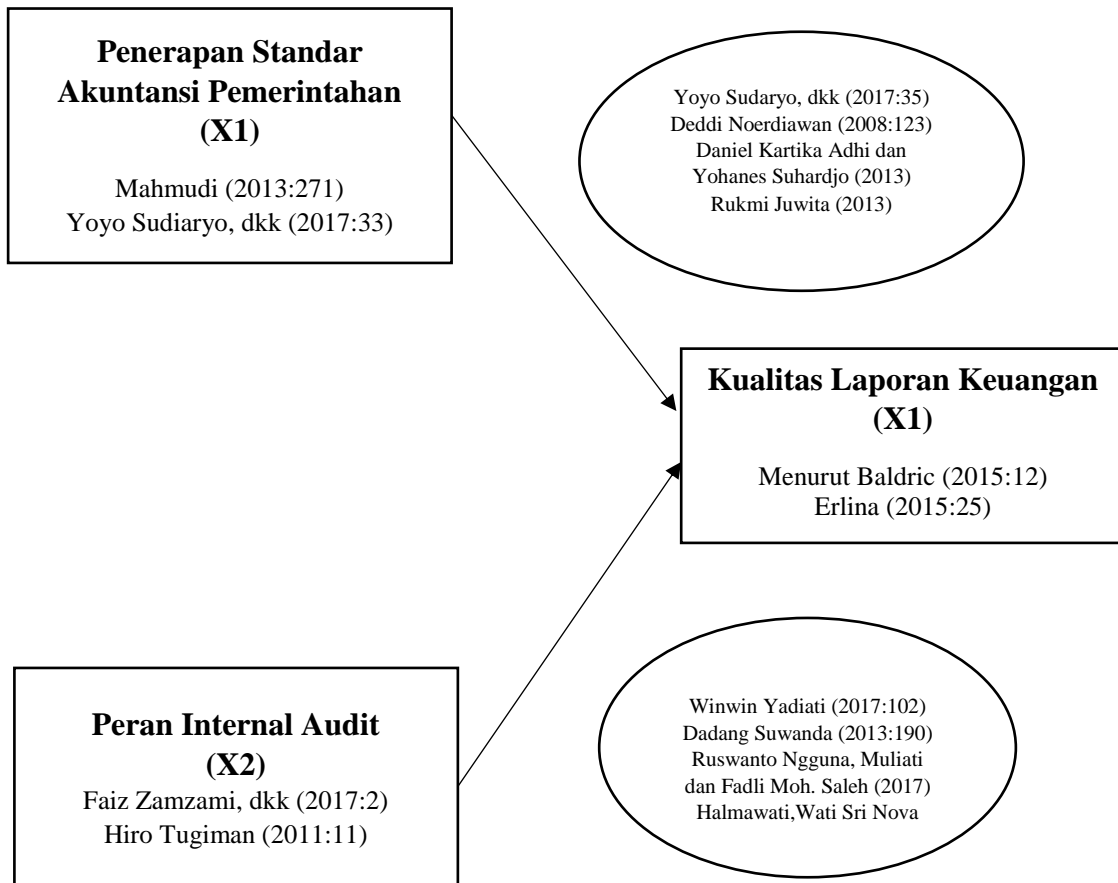
Selanjutnya dikatakan pula oleh Dadang Suwanda (2013:190) mengatakan bahwa:

“Aktivitas Audit Internal berupa penjaminan kualitas adalah *review* laporan keuangan, *review* dilakukan berupa pengujian untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akan diberikan asersi/pendapat oleh manajemen sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.”

Dalam penelitian sebelumnya menurut Ruswanto Ngguna, Muliati dan Fadli Moh. Saleh (2017) menyatakan bahwa Peran Internal Audit berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Kemudian menurut Halmawati, Wati Sri Nova (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Dari beberapa pernyataan diatas bahwa kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh peran internal audit. Peran internal audit tersebut dapat menentukan informasi keuangan yang telah disajikan dalam laporan keuangan apakah telah akurat dan dapat diandalkan sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan karena sebelum laporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit, laporan keuangan tersebut wajib direview oleh inspektorat Kabupaten/Kota yang merupakan auditor internal pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut sugiyono (2017:63) hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependent. Penulis dalam mengambil keputusan sementara (hipotesis) bahwa sebagai berikut :

H₁ : Terdapat pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

H₂ : Terdapat pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan.